

DAFTAR BACAAN

Daftar Buku :

- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M.Ali Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Harahap, M. Yahya Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina
Ilmu, Surabaya.,1987.
- , et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 1993.
- Hamilton, Robert W. The Law of Corporation, St. Paul, Minn West
Publishing Co, 1996.
- Kelsen,Hans Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusamedia, Jakarta ,2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar ilmu Hukum, Prenada Media, Jakarta,
2008.
- , Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
- , Sudikno, Penemuan hukum sebuah pengantar, Ed.II Cet.V,
Liberty Yogyakarta, 2007.
- Hidayat Panduan Mamahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya
di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung:, 2006, hlm. 2.
- Rahardjo, Satjipto Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1996.

- Randall S, Schuler dan Susan. E, Jackson, Manajemen Sumber daya manusia menghadapi abad ke 21. (Terjemahan Dwi Kartini Yahya) , Erlangga,Jakarta,1997.
- Soekanto,Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, , Jakarta .1984.
- Soeroso, R , Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soeroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, BPFE, Yogyakarta,1986
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum perdata, intermasa, Jakarta,2003.
- Swasono,Yudo, Metode Perencanaan Tenaga Kerja Tingkat Nasional,Regional dan perusahaan, BPFE ,Yogyakarta, 1993.
- Van Voss, Guus Heerma dan Surya Tjandra, Bab-bab tentang hukum Perburuhan Indonesia, , Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

Skripsi:

- Eric, “Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/Hum/2009)”, Skripsi, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ,2018.
- Saragih, Dwi Putri “Kajian Ekonomi Politik Dari Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ke Malaysia”, Skripsi, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan ,2018.
- Prabowo,Yudhan Rinto “Dampak Remintasi Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, Skripsi, Program Studi

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta , 2018.

Jurnal:

Amanda R. Y., ‘Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap
Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi’ , Jurnal Analisis Hubungan
Internasional’, Vol. 5 No. 2, Juni 2016.

Basuki, Bayu Prasetyo ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan Tenaga
Kerja Migran/Tenaga Kerja Indonesia’, Lex et Societatis, Vol. V/No.
6/Ags/2017.

Butsi, Citra Berlian, ‘Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
(Tki) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tki Pelaksana Teknis
Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ,
Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 7, 2013.

Christi, Theresia Lika Dan Arinto Nugroho , ‘Kepastian Hukum Perjanjian
Kerja Pekerja Migran Indonesia Yang Dapat Diperpanjang Dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017’ Novum : Jurnal Hukum
Volume 7 Nomor 2, April 2020.

Koesrianti, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah
Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung
Jawab Negara’, Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015. Suhartoyo,
‘Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri’ Adminitrative Law & Governance Journal.
Volume 2 Issue 3, August 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5390)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaa Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5660).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 263)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomoer 45 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 9 tahun 2019 tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Internet :

Abdul Rahim Sitorus, “Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2021 <<http://buruhmigran.or.id/2014/06/10/memahami-biaya-penempatan-tki-berlebih-overcharging-1/>>.

Adminsedane, “MENGUNGKAP EKSPLOITASI BURUH MIGRAN DI HONG KONG”, dikunjungi pada 12 maret 2020. <<http://majalahsedane.org/mengungkap-eksploitasi-buruh-migran-di-hong-kong-bagian-2/> >

Bobi Alwy, “Siaran Pers SBMI: Hentikan Praktik Overcharging oleh PPTKIS”, dikunjungi pada 20 September 2020. <<https://buruhmigran.or.id/2016/10/30/hentikan-praktik-overcharging-oleh-pptkis/>>

Bobi Anwar Ma'arif, "NUSRON WAHID DESAK TAIWAN GRATISKAN BIAYA
PENEMPATAN TKI", dikunjungi Pada 20 September 2020
<<https://buruhmigran.or.id>>

Buku saku perlindungan & pencegahan untuk pekerja migran Indonesia , dikunjungi
pada tanggal 20 November 2020, <<https://www.ilo.org/> df>

Wawancara :

Wawancara dengan PLT kepala usaha Tata Usaha BP2MI Jawa Timur
pada tanggal 18 februari 2021

Wawancara dengan Petugas Perlindungan dan pemasyarakatan Program
TKI BP2MI Jawa Timur, pada tanggal 18 februari 2021